

Polemik Sultan Perempuan di Yogyakarta
(Studi Pasca Kebijakan Penetapan Gusti Pembayun Menjadi Putri Mahkota)

Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: rifaatfarid@gmail.com

Abstract

Yogyakarta is led by a Sultan who concurrently serves as governor. The sultan who ruled at this time, Sultan Hamengkubuwana X did not have a son to be appointed as crown prince but according to court customs, if he did not have a son then the royal throne would fall to the sultan's younger brother. At present, the Sultan has appointed his eldest daughter to be the legitimate heir to the royal throne, contrary to customs. This raises the pros and cons of the internal and external courts. This paper looks at the issue of the appointment of the crown princess as the victory of the struggle of the women's movement to achieve equal rights and degrees towards men

Keywords: *Gender, Minorities At Risk, New Social Movement*

Abstrak

Yogyakarta dipimpin oleh seorang Sultan yang merangkap menjadi gubernur. Sultan yang memerintah saat ini, Sultan Hamengkubuwana X tidak mempunyai putra laki-laki untuk ditunjuk menjadi putra mahkota, akan tetapi menurut adat istiadat keraton, jika tidak memiliki anak laki-laki maka tahta kerajaan akan jatuh kepada adik sultan. Saat ini, Sultan sudah menetapkan putri sulungnya menjadi pewaris tahta kerajaan yang sah, berkebalikan dengan adat istiadat. Hal ini menimbulkan pro kontra dari internal maupun eksternal keraton. Paper ini melihat persoalan pengangkatan putri mahkota sebagai kemenangan perjuangan gerakan perempuan untuk mencapai persamaan hak dan derajat terhadap laki-laki

Kata kunci ; *Gender, Minorities At Risk, Gerakan Sosial Baru*

Alasan Sultan Selalu Laki-laki

Selama kepemimpinan 10 (sepuluh) sultan, tampuk pemerintahan selalu dipegang oleh laki-laki. Karena pada dasarnya memang kesultanan Yogyakarta merupakan monarki patrilineal, yaitu pewaris tahta kerajaan akan selalu diisi oleh

laki-laki. Jika yang menjadi raja dikemudian hari adalah perempuan, bisa jadi bakal merusak legenda atau kisah-kisah yang tumbuh subur di kalangan masyarakat kita. Satu contoh, penguasa atau Raja Keraton Yogyakarta adalah suami dari penguasa kerajaan pantai selatan, yakni “Nyai Roro Kidul” atau lebih dikenal dengan sebutan “Ratu Kidul”¹⁶³. Bila seandainya nanti Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat perempuan, pasti akan terjadi polemik yang sangat panjang. Sebab penguasa pantai selatan membutuhkan suami laki-laki, bukan perempuan.

Dari cerita legenda itu, nanti dalam masyarakat bisa jadi timbul pemikiran bahwa ratu pantai selatan, yakni Nyai Roro Kidul lesbian karena berpasangan dengan perempuan. Belum lagi, masalah tatanan budaya mulai dari pengageman (busana), pusaka yang dipakai raja. Begitu juga dengan singgasana dan lain sebagainya, semua itu dirancang untuk raja laki-laki bukan raja perempuan. Melihat dari sepenggal sejarah itu, sepertinya sulit bila Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, bakal dipimpin raja perempuan. Tetapi segala kemungkinan bisa terjadi, sama halnya dengan perubahan yang dilakukan oleh Hamengkubuwono X menunjuk putri sulungnya menjadi pewaris tahta kesultanan¹⁶⁴.

Selain itu ada 8 peraturan yang mengatur tentang syarat menjadi sultan, jika dilihat peraturan ini terkesan bias gender, dalam salah satu peraturan itu disebutkan bahwa Sultan harus mempunyai keberanian dan tanggung jawab seperti ayam jago. 8 peraturan mengenai syarat menjadi sultan adalah sebagai berikut :

1. Banyak (angsa) – kewaspadaan

Angsa menggambarkan bahwa sultan harus mempunyai sifat kewaspadaan terhadap setiap ancaman bagi keraton kesultanan maupun kepada rakyatnya secara keseluruhan.

2. Kidang (kijang) – Kecerdasan & ketangkasan

Penggambaran kijang dalam salah satu syarat ini adalah sultan harus memiliki kecerdasan intelektual dan tangkas dalam melakukan perbuatan.

¹⁶³ Haryadi Baskoro, “Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya, Merunut Sejarah, Mencermati Perubahan, Menggagas Masa Depan” Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2011 hlm 21

¹⁶⁴ Ibid hlm 22

3. Ayam jago (sawung) – keberanian dan tanggung jawab

Ayam jago menggambarkan bahwa sultan harus mempunyai keberanian dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah diambil.

4. Merak (galing) – Keanggunan

Penggambaran merak karena keanggunan harus dimiliki Sultan sebagai pemimpin dan panutan masyarakat Yogyakarta. Apalagi Yogyakarta sebagai pusat budaya Jawa, maka sudah sewajarnya Sultan mempunyai keanggunan khas budaya Jawa.

5. Naga raja (hardowaliko) - melambangkan kekuasaan

Naga raja sebagai perwujudan kekuasaan Raja Keraton Yogyakarta.

6. Kuthuk (kotak uang) - banyak memberi.

Sultan sebagai pemimpin digambarkan seperti kotak uang karena harus memiliki jiwa pemurah, suka memberi dan tidak pelit, terutama kepada rakyatnya sendiri.

7. Kacu emas (Sapu tangan yg bersih) - kebersihan hati dan batin

Penggambaran kacu emas dalam diri Sultan, karena diharapkan Sultan memiliki kebersihan hati dan batin sehingga dapat dicontoh oleh rakyatnya.

8. Teplok (Lentera) – Penerangan

Penggambaran lentera dalam salah satu syaratnya, Sultan diharuskan menjadi lentera bagi setiap permasalahan yang dihadapi kerajaan maupun rakyat Yogyakarta.

Selama ini, perempuan dalam lingkup kerajaan Jawa Islam, selalu dinomorduakan atau menjadi minoritas. Lelaki lebih diunggulkan dalam segala hal. Lelaki bisa menempati posisi tinggi, yaitu sebagai panglima perang, patih, penasihat raja maupun raja. Tetapi perempuan hanya sebagai pendamping raja dalam setiap acara keagamaan maupun acara resmi kerajaan. Hal ini juga yang terjadi dalam lingkup Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Sehingga perempuan menjadi kaum minoritas dalam adat istiadat kraton, dimana mayoritas pengisian jabatan, ataupun pengambilan wewenang didominasi oleh laki-laki.

Sultan Hamengkubuwono X tidak memperdulikan beberapa persyaratan dan adat istiadat yang telah terjadi selama ini, sehingga pada tanggal 5 Mei 2015¹⁶⁵ Sultan mengeluarkan sabda raja yang berisi penunjukan putri sulungnya, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun menjadi putri mahkota dan berganti nama menjadi GKR Mangkubumi. Berikut isi Dawuh Raja yang dikeluarkan Sultan pada 5 Mei 2015:

“Siro adi ingsun, sekseono ingsun Sampean Dalem Inkgang Sinuhun Sri Sultan Hamengku Bawono Inkgang Jumeneng Kasepuluh Surya ning Mataram, Senopati ing Kalogo, Langenging Bawono Langgeng, Langgeng ing Toto Panotogomo Kadawuhan netepake Putri Ingsun Gusti Kanjeng Ratu Pembayun tak tetepake Gusti Kanjeng Ratu GKR Mangkubumi. Mangertenono yo mengkono dawuh ingsun”.

Dalam bahasa Indonesia, Sabda Raja tersebut artinya:

“Saudara semua, saksikanlah saya Sampean Dalem Inkgang Sinuhun Sri Sultan Hamengku Bawono Inkgang Jumeneng Kasepuluh Surya ning Mataram, Senopati ing Kalogo, Langenging Bawono Langgeng, Langgeng ing Toto Panotogomo mendapat perintah untuk menetapkan Putri saya Gusti Kanjeng Ratu Pembayun menjadi Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng ing Mataram. Mengertilah, begitulah perintah saya”.

Hal ini kemudian ditentang oleh 11 adik sultan, yang menganggap penunjukan GKR Pembayun dianggap menyalahi tradisi kraton selama berabad-abad dalam hal pewaris tahta adalah laki-laki. Karena hal ini pula hubungan Sultan dengan Saudaranya yang lain menjadi tidak akur, bahkan tidak saling berkomunikasi hingga 3 tahun belakangan.¹⁶⁶

Menurut adat istiadat yang ada selama ini, apabila Sultan tidak mempunyai anak perempuan, maka pewaris tahta jatuh kepada adik sultan, sama yang dialami Sultan Hamengkubuwono V yang tidak mempunyai anak laki-laki, pewaris tahta jatuh kepada adik laki-laki-laki-laki kandungnya yang kelak kemudian hari dikenal sebagai Sultan Hamengkubuwono VI.

¹⁶⁵ <https://nasional.tempo.co/read/664761/berikut-isi-utuh-sabda-raja-yogya>

¹⁶⁶ <https://nasional.tempo.co/read/1059225/polemik-sabda-raja-sultan-hb-x-3-tahun-kerabat-keraton-berseteru>

Tabel 1 : Sultan Hamengkubuwono Yogyakarta

NAMA	TAHUN MEMERINTAH
Sultan Hamengkubuwono I	Tahun 1755 – 1792
Sultan Hamengkubuwono II	Memerintah tiga periode: tahun 1792 - 1810, 1811 - 1812, dan 1826 – 1828
Sultan Hamengkubuwono III	Memerintah dua periode tahun 1810 - 1811 dan 1812 – 1814
Sultan Hamengkubuwono IV	Tahun 1814 – 1822
Sultan Hamengkubuwono V	Memerintah dua periode 19 Desember 1823 - 17 Agustus 1826, dan 17 Januari 1828 - 5 Juni 1855
Sultan Hamengkubuwono VI	Tahun 1855 – 1877
Sultan Hamengkubuwono VII	Tahun 1877 – 1920
Sultan Hamengkubuwono VIII	Tahun 1921 – 1939
Sultan Hamengkubuwono IX	Tahun 1940 – 1988
Sultan Hamengkubuwono X	Tahun 1989 – sekarang

Minorities at Risk dan Gerakan Sosial Baru

Minoritas merupakan golongan sosial yang jumlah warganya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan golongan lain dalam suatu masyarakat dan karena itu golongan minoritas didiskriminasikan oleh golongan mayoritas.¹⁶⁷ Karena jumlahnya yang sedikit ini kelompok minoritas mengalami kerentanan dan mereka memiliki posisi sebagai kelompok yang kalah. Hal ini terjadi karena kurangnya jumlah orang dalam kelompok tersebut menimbulkan kekuatan yang sedikit pula sehingga jika terjadi sebuah penyerangan yang dilakukan kelompok mayoritas yang memiliki jumlah lebih banyak maka kelompok minoritas dapat dikalah dengan mudah.

Dalam teori *minorities at risk* yang dijabarkan oleh Ted Robert Gurr menjelaskan perlawanan kaum minoritas terhadap kaum yang menjajahnya. Kaum minoritas dapat melakukan perlawanan dikarenakan mereka sudah lelah menjadi kaum yang mendapatkan diskriminasi dari kaum mayoritas. Akhirnya kaum minoritas yang awalnya hanya diam jika mendapatkan diskriminasi mulai memberontak dan mengeluarkan suara mereka.

¹⁶⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Dalam hal ini, yang menjadi minoritas adalah kerabat keraton yang berjenis kelamin perempuan, yang menjadi mayoritas adalah kerabat keraton yang berjenis kelamin laki-laki dan segala legenda maupun adat istiadat yang melegitimasi perempuan tidak pantas menjadi sultan. Selama ini, perempuan dalam lingkup keraton cenderung dinomor duakan, perempuan hanya menjadi istri selir maupun dayang bagi putri raja. Selama pemerintahan 9 raja, pewaris tahta adalah laki-laki, hal ini yang kemudian diubah oleh Sultan Hamengkubuwono X dengan menunjuk GKR Pembayun menjadi putri mahkota.

Hak-hak kelompok yang dibedakan, dapat membantu memperbaiki kerugian itu, dengan mengangkat kerentanan yang terjadi dalam kelompok minoritas ke keputusan mayoritas. Perlindungan-perlindungan eksternal menjamin bahwa para anggota dari kelompok minoritas mempunyai kesempatan yang sama untuk tetap hidup dan bekerja sama dengan kelompok mayoritas.¹⁶⁸

Sultan sebenarnya sudah menunjukkan diri sebagai raja yang pro kesetaraan gender, dibuktikan dengan memperbolehkan GKR Emas mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI semenjak tahun 2004 sampai sekarang dan mengizinkan GKR Pembayun untuk hadir di beberapa acara resmi mewakili keraton Yogyakarta. Sikap pro gender lainnya walaupun tidak mempunyai keturunan laki-laki, Sultan tidak berpoligami layaknya raja - raja Jawa yang lain untuk mendapatkan keturunan laki-laki

Di lain pihak, sultan juga salah satu pemrakarsa membentuk Tim Koordinasi Pembangunan Berspektif Gender (TKBPG) yang kemudian hari menjadi cikal bakal berdirinya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIY, suatu badan pemerintah daerah yang bertugas melakukan pemberdayaan perempuan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pada era Sultan sebelumnya, badan yang melakukan pemberdayaan ini belum berdiri, baru pada masa pemerintahan Sultan yang sekarang, badan ini berdiri atas prakarsa tentu saja Sultan sendiri.

Perbuatan yang dilakukan oleh kaum perempuan dan didukung Sultan ini termasuk gerakan sosial baru. Gerakan sosial baru muncul sebagai kritik atas

¹⁶⁸ Kymlicka Will "*Kewargaan Multikultural*", Jakarta, 1995, LP3ES hlm 163

gerakan sosial lama yang cirinya tertuju pada ekonomi-material. Menurut Nash gerakan sosial baru lebih terfokus pada tujuan non material dan lebih menekankan pada perubahan-perubahan gaya hidup dan kebudayaan dari pada mendorong perubahan-perubahan spesifik dalam kebijakan publik atau perubahan ekonomi.¹⁶⁹ Gerakan sosial baru mulai mengangkat isu-isu yang lebih beragam dan tidak tertuju pada satu kelas. Isu yang diangkat oleh gerakan sosial baru seperti isu lingkungan, feminisme, hak asasi, perdamaian dan sebagainya.

Gerakan sosial baru biasanya melibatkan politik akar-rumput dimana aksi-aksi akar rumput kerap menginisiasi gerakan mikro kelompok-kelompok kecil dan mereka membidik isu lokal dengan sebuah dasar institusi dengan melakukan pembingkaihan isu (*framing*) terlebih dahulu. Gerakan sosial baru melahirkan sebuah asosiasi demokrasi yang terorganisasi yang kemudian terjalin dalam federasi tingkat nasional. Selain itu gerakan sosial baru ini memiliki cita-cita, tujuan, keinginan dan orientasi yang plural.¹⁷⁰

Dari segi partisipan dan aktor, gerakan sosial baru terkesan berasal dari kalangan kelas menengah baru. Kelas menengah baru ini bekerja dalam sektor-sektor yang bergantung pada belanja negara seperti akademisi, seniman serta agen-agen pelayanan kemanusiaan. Aktor-aktor tersebut merupakan kalangan yang terdidik. Selain itu unsur kemanusiaan terlihat mendominasi dalam tujuan gerakan sosial baru. Dari segi pengadvokasiannya gerakan sosial baru lebih memilih jalan dengan yang terfokus oleh proses dan hasil tanpa menggunakan kekerasan, seperti *policy brief*, mediasi dan sebagainya.

Dari masalah yang dihadapi keraton Yogyakarta, aktor dan partisipan merupakan kalangan kelas menengah ; kaum bangsawan keraton yang terpelajar. Oleh karenanya, perempuan yang dalam hal ini diwakili oleh GKR Hemas dan putrinya GKR Pembayun, adalah sosok perempuan yang mengenyam pendidikan

¹⁶⁹ Putra, Fadillah., Heri, Setiono., Sutomo., Saiful, Arif. “*Gerakan Sosial: Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan dan Tantangan Gerakan Sosial di Indonesia*”. Malang, 2006: Averroes Press. Hal. 63-64

¹⁷⁰ Putra, Fadillah., Heri, Setiono., Sutomo., Saiful, Arif. “*Gerakan Sosial: Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan dan Tantangan Gerakan Sosial di Indonesia*”. Malang, 2006: Averroes Press. Hal. 65

dan orientasi cara berpikirnya adalah orientasi feminisme, yaitu persamaan derajat dan hak perempuan terhadap laki-laki tanpa membedakan.

Keadilan Gender Bagi Perempuan Keraton

Inti dari gerakan feminisme adalah konsep keadilan gender antara perempuan dan laki-laki, tentu saja memahami konsep gender harus dibedakan antara kata gender dan seks. Seks atau jenis kelamin merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis alat kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Secara biologis alat kelamin antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dipertukarkan. Secara umum, pengertian gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku.

Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Perubahan ciri dan sifat yang terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lainnya akibat konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai kelas sosial, usia dan latar belakang etnis mengikuti perkembangan zaman disebut konsep gender.¹⁷¹

Di Inggris abad ke sembilan belas ada anggapan bahwa kaum perempuan tidak pantas bekerja di luar rumah guna mendapatkan upah. Kini keadaan serupa juga terdapat di beberapa negara berkembang. Di Bangladesh misalnya, banyak perempuan menganggap tidak pantas bekerja, namun adapula yang terpaksa bekerja sebagai masalah pertahanan ekonomi. Dengan kata lain, kelas (*class*) nyaris selalu berkaitan dengan urusan memutuskan peran gender yang pantas karena memiliki jenis kelamin tertentu.¹⁷²

Istilah gender dan seks memiliki perbedaan dari segi dimensi. Istilah seks (jenis kelamin) mengacu pada dimensi biologis seorang laki-laki dan perempuan, sedangkan istilah gender mengacu pada dimensi sosial budaya seorang laki-laki dan perempuan. Selain itu istilah gender merujuk pada karakteristik dan ciri-ciri

¹⁷¹ Mansour Fakih. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm 22.

¹⁷² Terj. Julia Cleves Mosses, "An Introduction to Gender and Development" (Gender dan Pembangunan), Yogyakarta; Pustaka Pelajar 1996, hlm 5- 6.

sosial yang diasosiasikan pada laki-laki dan perempuan. Karakteristik dan ciri yang diasosikan tidak hanya didasarkan pada perbedaan biologis, melainkan juga pada interpretasi sosial dan kultural tentang apa artinya menjadi laki-laki atau perempuan.¹⁷³

Gender sama sekali tidak berhubungan dengan kondisi biologis tetapi lebih merupakan sebuah konsep konstruksi sosial yang mendefinisikan peran serta hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Dan pengembangan peran gender juga bertolak dari perbedaan seksual.¹⁷⁴ Selain itu, ada juga anggapan bahwa ketidakadilan gender hanya menimpa kaum perempuan dan studinya berfokus pada mereka. Dalam beberapa hal, laki-laki berada pada posisi inferior meskipun kualitasnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kasus pada perempuan.¹⁷⁵ Pada akhirnya, kesetaraan gender tidak dimaksudkan sebagai kondisi dimana perempuan harus menyamai laki-laki dalam segala hal tetapi lebih pada sebuah kondisi dimana pria dan wanita memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam segala hal yang berkaitan dengan konstruksi sosial masyarakat.

Namun, karena surplus ekonomi yang dihasilkan oleh laki-laki yang membuat laki-laki semakin berkuasa, maka perempuan semakin terpinggirkan dan menjadi sangat bergantung pada laki-laki. Perkembangan perempuan selanjutnya adalah berubahnya pola keluarga monogami dari matriaki menjadi patriarki, dimana kerja rumah tangga perempuan menjadi pelayan pribadi.¹⁷⁶ Dalam hal ini perempuan menjadi pelayan laki-laki dalam rumah tangga yang disingkirkan dari semua partisipasi di bidang produksi dan sosial. Ketidakberdayaan perempuan untuk mengalahkan dominasi laki-laki digambarkan dengan membangun suatu pandangan di masyarakat bahwa perempuan makhluk mulia, perempuan sebagai tiang negara, surga di bawah telapak kaki ibu, mendidik mengasuh merawat anak

¹⁷³ Terj. Santrock, J. "*Adolescence*" (Perkembangan Remaja) Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003 hlm 43.

¹⁷⁴ Ratna Megawangi, "*Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*", (Surabaya: Risalah Gusti, 2000) hlm, 92.

¹⁷⁵ Mansour Fakih, "*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 24.

¹⁷⁶ Rifka Annisa, "*Dadi Wong Lanang*", (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2014), hlm. 63.

termasuk mengurus suami adalah pekerjaan mulia bagi perempuan, dan sebagainya.¹⁷⁷

Persoalan perempuan berkaitan dengan masalah ketimpangan gender seperti contoh pada paragraf sebelumnya memang dapat mengundang rasa simpati yang cukup besar dari masyarakat luas. Hal ini terjadi karena permasalahan ketimpangan gender sering dianggap erat dengan persoalan keadilan sosial yang lebih luas, seperti isu-isu yang berkisar pada kesenjangan ekonomi orang kaya dan miskin hingga ketimpangan ekonomi antara negara kaya dan negara miskin.

Tinjauan Tentang Peranan Laki-laki Terhadap Perempuan Menurut Islam

Sebelum datangnya Islam, kaum laki-laki menempati posisi sentral dan istimewa dalam keluarga dan bermasyarakat. Mereka bertanggung jawab secara keseluruhan dalam persoalan kehidupan keluargam sehingga kaum perempuan secara umum hanya mengekor kaum laki-laki. Jika digeneralisir, maka ada satu kesalahan umum, yaitu di kalangan laki-laki mereka tidak ada sikap memanusiakan perempuan, baik karena disebabkan oleh pengingkaran kemanusiaannya atau karena anggapan kaum laki-laki bahwa peran perempuan tidak dapat diandalkan dalam berbagai sektor kehidupan bermasyarakat.¹⁷⁸ Oleh karenanya, hadirnya Islam mengikis habis anggapan tersebut dan menempatkan kedudukan perempuan menjadi terhormat dalam kehidupan.

Dalam ajaran Islam, tidak diragukan lagi al-Qur'an memandang laki-laki dan perempuan dalam berbagai terminologi kesetaraan sebagai makhluk manusia dalam berbagai hal. Keseluruhan spirit Islam secara umum sangat menegaskan kesetaraan kedua jenis seks tersebut baik dalam status, posisi dan nilai, mereka memiliki status dan nilai yang sama sebagai manusia dalam masyarakat. Bukan suatu alasan yang mendasar untuk membedakan keduanya hanya karena yang satu perempuan dan yang lain laki-laki.¹⁷⁹

¹⁷⁷ Mansour Fakih, "*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*", hlm 64.

¹⁷⁸ Azizah al-Hibri dkk, "*Wanita dalam Masyarakat Indonesia, Akses Pemberdayaan dan Kesempatan*" (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001) hlm 39

¹⁷⁹ Waryono, Muhammad Isnanto, "*Gender dan Islam: Teks dan Konteks*" (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm. 28

Haifaa A. Jawad sebagaimana dikutip oleh Waryono dan Muhammad Isnanto menyebutkan bahwa Islam telah memberikan suatu jaminan yang tegas dan pasti kepada kaum perempuan baik dalam peran sosial, hak-hak politik dan ekonomi, pendidikan dan pelatihan, maupun kesempatan-kesempatan kerja.¹⁸⁰ Dalam bidang politik atau pemerintahan mislanya, Islam sangat mendorong kaum perempuan untuk aktif secara politik dan ikut terlibat dalam pengambilan keputusan. Islam memandang perempuan sebagai individu yang terhormat dan patut mendapatkan respek, makhluk yang independen, makhluk sosial dan makhluk berbakat sebagaimana kaum laki-laki, yang memiliki hati, jiwa dan intelektual serta memiliki hak-hak setara dalam mengaplikasikan dan mengembangkan kemampuan dan keterampilannya disetiap sektor aktivitas umat manusia.¹⁸¹

Sebelum datangnya Islam, kaum laki-laki menempati posisi sentral dan istimewa dalam keluarga dan bermasyarakat. Mereka bertanggung jawab secara keseluruhan dalam persoalan kehidupan keluargam sehingga kaum perempuan secara umum hanya mengekor kaum laki-laki. Jika digeneralisir, maka ada satu kesalahan umum, yaitu di kalangan laki-laki mereka tidak ada sikap memanusiakan perempuan, baik karena disebabkan oleh pengingkaran kemanusiaannya atau karena anggapan kaum laki-laki bahwa peran perempuan tidak dapat diandalkan dalam berbagai sektor kehidupan bermasyarakat.¹⁸² Oleh karenanya, hadirnya Islam mengikis habis anggapan tersebut dan menempatkan kedudukan perempuan menjadi terhormat dalam kehidupan.

Allah telah menciptakan perempuan sebagai pasangan dari laki-laki, ini merupakan fenomena alamiah yang merupakan *Sunnatullah* seperti dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49.¹⁸³

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

¹⁸⁰ Ibid 31

¹⁸¹ Waryono, Muhammad Isnanto, "Gender dan Islam: Teks dan Konteks" (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm. 34

¹⁸² Azizah al-Hibri dkk, "Wanita dalam Masyarakat Indonesia, Akses Pemberdayaan dan Kesempatan" (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001) hlm 39

¹⁸³ Ratna Megawangi, "Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam", (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 92.

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Perempuan merupakan makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, sebagaimana dahulu Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Sesudah Nabi Adam memberitahukan nama seluruh benda kepada Malaikat, Nabi Adam merasa mengantuk, Allah mengambil sepotong tulang rusuk dari sisi tubuhnya yang kiri, dan membalutnya dengan sepotong daging kemudian Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk itu.¹⁸⁴

Sultan Hamengkubuwon X ingin mengubah adat istiadat selama ini yang memenangkan kaum laki-laki, dengan cara menunjuk putrinya sebagai penerus tahta. Ini merupakan titik balik kemenangan gerakan sosial baru kaum perempuan yang selama ini selalu dicita-citakan, terutama oleh perempuan kerabat kerajaan. Pada awalnya, GKR Hemas diizinkan oleh sultan menjadi anggota DPD, sultan membentuk BPPM, kemudian puncak kemenangannya dengan menjadikan GKR Pembayun menjadi putri mahkota.

Sultan menyadari bahwa kebijakan penunjukan putrinya akan menimbulkan pro kontra, namun dengan kewibawaan sultan, secara perlahan pengangkatan putri mahkota ini dapat diterima orang banyak dari internal kraton maupun eksternal kraton. Adik-adik sultan yang pada awalnya menentang mulai bisa menerima keputusan ini.

Sultan sendiri juga tidak memperdulikan mitos mitos yang berkembang selama ini mengenai raja kraton Kasultanan Yogyakarta adalah suami dari ‘Nyi Roro Kidul’, seiring berkembangnya teknologi dan pengetahuan manusia, maka cerita irrasional seperti ini akan semakin tidak dipercayai oleh masyarakat.

Sultan juga mengubah gelar kesultanan dalam rangka melanggengkan putrinya menjadi putri mahkota dengan cara mengeluarkan sabda raja yang berisi perubahan gelar dari semula Sultan Hamengkubuwono Senapati ing Alogo Ngabdurrokhman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Dasa. Kemudian Sultan menghapus gelar Panatagama Khalifatullah yang berarti

¹⁸⁴ Terj. “*Al Misbahul Muniir fii Tahdziii Tafsir Ibni Katsir*” (Tafsir Ibnu Katsir) Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006, jilid 1 hlm. 281.

pemuka agama pemimpin di bumi Allah, dan mengganti nama Hamengkubuwono menjadi Hamengkubawono. Walaupun tidak ada legitimasi hukum terhadap perubahan gelar ini, karena di aturan perundangan masih mengacu pada gelar yang lama.

Banyak pembela hak-hak perempuan; terutama GKR Hemas dan putri putri Sultan, menekankan bahwa perempuan diperlukan untuk memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan dengan kesetaraan yang sebenarnya. Atas pandangan ini, akomodasi dari perbedaan – perbedaan yang selama ini diterima perempuan adalah inti dari kesetaraan yang sebenarnya, dan hak-hak khusus kelompok diperlukan untuk mengakomodasi perbedaan-perbedaan itu. Sultan selaku pimpinan tertinggi dalam lingkup kraton kemudian berani mengambil contoh bagi yang lain supaya berani mengakomodasi hak-hak minoritas untuk menciptakan kesetaraan.

Kesimpulan

Tindakan yang dilakukan Sultan menetapkan putrinya menjadi penerus tahta kerajaan adalah suatu hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak kaum minoritas dalam konstruksi sosial masyarakat. Jika dikaitkan dengan esensi kepemimpinan dalam ranah kraton, perempuan diberikan hak yang sama untuk dapat menjadi raja, hal ini pasti akan menimbulkan perdebatan panjang. Ada pro kontra dalam penetapan ini, sehingga apapun yang dilakukan Sultan perlu diapresiasi karena memberikan hak dan ruang yang sama bagi perempuan dengan laki-laki. Perdebatan ini pernah terjadi pasca keluarnya sabda raja pengangkatan GKR Pembayun antara kalangan yang pro dan kontra dengan sabda raja tersebut.

Pemenuhan hak-hak kaum minoritas, merupakan ranah subunit politik Sultan sebagai pemimpin yang harus dihargai, bukan untuk diperdebatkan yang berujung kepada perpecahan internal maupun eksternal kraton. Kebijakan akomodatif ini juga merupakan puncak kemenangan perjuangan bangsawan perempuan kraton menuntut persamaan hak yang selama ini selalu disingkirkan, disisihkan bahkan tak dihiraukan dalam hal pengisian tahta kraton.

Kita selaku masyarakat secara umum dan Sultan secara khusus, harus mempunyai pikiran mengakomodir minoritas dan mayoritas sebagai kesatuan entitas, bukan pengibiran hak-hak minoritas. Kita harus menyadari hal itu agar dapat menjauhkan atau merugikan orang lain, dan mengambil langkah yang tepat untuk mencegah terjadinya ketidakadilan. Langkah itu dapat menyertakan hak-hak untuk mengakomodasi kelompok minoritas yang dirugikan di dalam minoritas pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

Azizah al-Hibri dkk, *“Wanita dalam Masyarakat Indonesia, Akses Pemberdayaan dan Kesempatan”* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001)

Haryadi Baskoro, *“Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya, Merunut Sejarah, Mencermati Perubahan, Menggagas Masa Depan”* Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2011

<https://nasional.tempo.co/read/664761/berikut-isi-utuh-sabda-raja-yogya>

<https://nasional.tempo.co/read/1059225/polemik-sabda-raja-sultan-hb-x-3-tahun-kerabat-keraton-berseteru>

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kymlicka Will *“Kewargaan Multikultural”*, Jakarta, 1995, LP3ES

Mansour Fakih, *“Analisis Gender dan Transformasi Sosial”*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Putra, Fadillah., Heri, Setiono., Sutomo., Saiful, Arif. *“Gerakan Sosial: Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan dan Tantangan Gerakan Sosial di Indonesia”*. Malang, 2006: Averroes Press

Ratna Megawangi, *“Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam”*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.

Terj. Santrock, J. *“Adolescence”* (Perkembangan Remaja) Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003.

Terj. Julia Cleves Mosses, *“An Introduction to Gender and Development”* (Gender dan Pembangunan), Yogyakarta; Pustaka Pelajar 1996.

Waryono, Muhammad Isnanto, *“Gender dan Islam: Teks dan Konteks”*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009